

MEMAHAMI STUDI PERDAMAIAN SEBAGAI BAGIAN DARI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

UNDERSTANDING PEACE STUDIES AS PART OF INTERNATIONAL RELATIONS

M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan

UPN “Veteran” Jakarta

(m.prakosoaji@gmail.com dan jerry_indrawan18@yahoo.co.id)

Abstrak – Studi Perdamaian adalah sebuah disiplin ilmu yang diturunkan dari ilmu Hubungan Internasional. Dalam perkembangannya, ilmu Hubungan Internasional banyak berhadapan dengan kasus-kasus yang terkait dengan konflik dan peperangan antar-negara, maupun negara dengan non-negara. Untuk itulah, Studi Perdamaian lahir agar kajiannya dapat fokus membahas masalah-masalah seputar konflik, perang, serta upaya resolusinya. Studi Perdamaian pada umumnya diasosiasikan dengan konsep resolusi konflik. Salah satu metode resolusi konflik dalam Studi Perdamaian adalah konsep transformasi konflik. Transformasi konflik tidak hanya bertujuan untuk menghentikan konflik dan mengubah pola-pola hubungan negatif antar pihak-pihak yang berkonflik, tapi juga untuk mengubah struktur politik, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan adanya pola-pola hubungan negatif tersebut. Studi Perdamaian menawarkan analisis baru tentang bagaimana seharusnya hubungan internasional melihat kompleksitas hubungan antar aktor-aktor. Penulis tidak melakukan riset lapangan terkait artikel ini, namun melakukan telaah konsep melalui studi pustaka. Kegunaan tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana Studi Perdamaian dapat membantu menjawab permasalahan dalam Hubungan Internasional terkait konflik atau perang yang terjadi secara internasional.

Kata Kunci : studi perdamaian, konflik, konflik bersenjata, kekerasan, dan transformasi konflik

Abstract – Peace Studies is a discipline that is derived from International Relations. With the development of International Relations, they are dealing with cases related to conflicts and wars between states, as well as states with non-states. For this reason, Peace Studies was born so that it can focus on discussing issues surrounding conflict, war, and resolution efforts. Peace Studies in general are associated with the concept of conflict resolution. One method of conflict resolution in Peace Studies is the concept of conflict transformation. Conflict transformation is not only aimed at stopping conflict and to change patterns of negative relations between conflicting parties, but also to change the political, social and economic structure that causes the patterns of negative relations. Peace Studies offers a new analysis of how International Relations should look at the complexity of relations between actors. The author did not conduct field research related to this article, but conduct a conceptual research through literature study. The purpose of this article is to see how Peace Studies can help answer problems in International Relations related to conflicts or wars that occur internationally.

Keywords: peace studies, conflict, armed conflict, violence, and conflict transformation

Pendahuluan

Apakah konflik akan selalu ada? Jika selalu ada, bagaimana cara kita mengatasinya? Studi tentang konflik, yang banyak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Politik, Sosiologi, Anthropologi, Psikologi, sampai Hubungan Internasional, selalu berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebagai sebuah kajian yang sebenarnya bukan hal baru, Studi Perdamaian yang lahir dari studi Hubungan Internasional dapat menawarkan alternatif analisis terkait kompleksitas dinamika hubungan antar-negara, maupun negara dengan non-negara, di mana perang dan damai selalu menjadi *trending topic*-nya.

Karena itulah, perang dan damai adalah permasalahan yang kompleks dan sangat dinamis. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika interaksi antar aktor dalam politik global yang semakin hari semakin kompleks. Kompleksitas dari interaksi ini, terkait dengan munculnya aktor-aktor baru yang terlibat, yang saat ini tidak lagi difokuskan pada aktor-aktor negara saja, namun juga munculnya peran dari aktor-aktor non-negara. Aktor-aktor non-negara yang justru mewarnai konstelasi politik dan keamanan internasional di era globalisasi ini, seperti teroris, kejahatan transnasional, NGO, media internasional, sampai tokoh individu yang berperan penting dalam percaturan global tadi.¹ Munculnya aktor-

¹ Penulis mengutip dari buku penulis sendiri, yaitu Jerry Indrawan, *Pengantar Studi Keamanan*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm. 131-132. Untuk memahami lebih lanjut, silahkan lihat Allan Collins, Allan (Ed), *Contemporary Security Studies*,

aktor transnasional dan non-negara yang memiliki kapasitas aksi secara global ini tentunya mempengaruhi dinamika hubungan internasional, terutama dilihat dari Studi Perdamaian.

Berbagai cara dilakukan agar dunia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya, misalnya lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pasca Perang Dunia II dengan tujuan mengatur hubungan antar negara-negara di dunia, serta untuk mencegah perang dan menciptakan perdamaian internasional. Sampai sekarang, kiprah PBB cukup berhasil mengurangi jumlah perang antar-negara. Namun, hal ini tidak membuat perang hilang begitu saja. Dalam perkembangannya, perang dalam bentuk-bentuk lain bermunculan, terutama konflik bersenjata internal (*intra-state armed conflict*) atau konflik bersenjata yang terjadi didalam sebuah negara.²

Teori-teori yang muncul dalam studi Hubungan Internasional berguna untuk membuka jalan menuju perdamaian. Saat salah satu tujuan ilmu Hubungan Internasional adalah untuk menghindari terjadinya perang dalam skala global, belajar dari terjadinya dua perang maha dahsyat di abad ke-20 lalu. Untuk itu, tujuan Studi Perdamaian harusnya juga demikian karena memang lahir dari rahim

(New York: Oxford University Press, 2010); Peter Hough, *Understanding Global Security*, (New York: Routledge, 2008); serta Columba Peoples dan Nick Vaughan Williams (Ed), *Critical Security Studies*, (New York: Routledge, 2013).

² A. A. Banyu Perwita dan Nabilla Sabban (ed), *Kajian Konflik dan Perdamaian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 3-4.

ilmu Hubungan Internasional.

Dari beberapa teori Hubungan Internasional, realisme salah satunya, dipahami bahwa perdamaian dapat ditemui dalam *balance of power* antar-negara, ataupun dengan adanya suatu hegemoni. Sedangkan, bagi kaum kapitalis, perdamaian bisa diwujudkan dengan cara kerja sama dan pengumpulan kekayaan (*accumulation of wealth*). Paham lingkungan (*Green Thought*) menganggap bahwa dunia akan aman dan damai jika manusia tidak merusak alam. Kemudian, liberalisme melihat bahwa perdamaian ada dalam institusionalisasi norma liberal dari ekonomi politik internasional yang berbasis pada kerja sama saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Marxisme menghendaki tercapainya perdamaian dengan penghilangan kelas yang menjadi dasar dari penindasan melalui sebuah revolusi. Sementara itu, kelompok idealisme atau utopian memahami perdamaian sebagai keadaan ketika negara dan individu berada dalam kebebasan, kesejahteraan, dan tidak ada ancaman.

Perdamaian dapat dicapai jika negara-negara di dunia dapat diatur dengan menggunakan sebuah sistem atau ideologi yang sama seperti demokrasi. Kombinasi antara demokrasi dengan ekonomi liberal dianggap sebagai solusi untuk menciptakan perdamaian dunia, karena dengan diimplementasikannya sistem ini, maka akan tercipta ketergantungan di antara negara yang satu dengan yang lainnya, terutama secara

ekonomi, berakibat pada kemungkinan terjadinya perang akan sangat kecil.³

Demokrasi kemudian dikampanyekan secara massif untuk menggantikan ideologi atau pun sistem-sistem pemerintahan lain yang dianggap tidak lebih baik daripada demokrasi. Ekonomi liberal pun kian gencar dikampanyekan, begitu pula dengan pola pembangunan perdamaian secara liberal, yang tidak hanya mengurus gencatan senjata, tetapi juga perdamaian berkelanjutan, intervensi kemanusiaan, operasi pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping operation*), dan lain-lain. Namun, model seperti ini tidak luput dari kritik. Negara yang menggunakan sistem demokrasi mungkin tidak berperang dengan satu dan lainnya, akan tetapi berperang dengan negara yang memiliki perbedaan ideologi untuk memaksakan adanya penerapan sistem demokrasi. Dengan kata lain, perang tetap saja terjadi.⁴

Security dilemma juga merupakan kajian dalam ilmu Hubungan Internasional, yang jika kita pahami dari sisi Studi Perdamaian, maka situasi ini dapat membawa negara-negara dalam situasi tidak saling berperang. Dilema muncul saat menentukan apakah kekuatan militer yang dimiliki hanya digunakan untuk pertahanan atau malah untuk menyerang dengan tujuan melindungi diri. Sebagai contoh analogi, jika kita ingin meningkatkan keamanan rumah kita, dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama,

³ *Ibid*, hlm. 4.

⁴ *Ibid*, hlm. 4-5.

meningkatkan sistem keamanannya, seperti pagar, anjing penjaga, satpam, alarm, dan lain-lain. Kedua, menanggapi setiap orang yang melewati rumah kita dengan anggapan ia akan menyerang rumah kita. Para pembuat kebijakan harus bisa menentukan respons mereka terhadap apa yang mereka anggap akan terjadi. Apakah mereka akan menunggu serangan dengan memperkuat pertahanan, ataukah mereka menyerang terlebih dulu karena menganggap akan diserang? Kebijakan menentukan di antara dua inilah yang sulit dan menimbulkan dilema dan ketidakpastian antara langkah-langkah diplomasi atau militer. Dilema ini mengarah pada situasi tidak ada perang antar-negara, alias perdamaian internasional.⁵

Suasana abad ke-21 sangat intens dan mengglobal, multi-level dan multi-arah sehingga banyak dari isu-isu di atas menjadi subjek kajian *security dilemma*, termasuk *security dilemma sensibility* dan *security communities*. *Security dilemma sensibility* adalah konsep yang diperkenalkan Mikhail Gorbachev tahun 1985. Ia bisa menurunkan derajat persaingan Perang Dingin antara Soviet dengan Amerika Serikat (setelah 5 tahun akhirnya Perang Dingin benar-benar berakhir) karena ia paham bagaimana negara Paman Sam tersebut merasa terancam dengan kekuatan militer Soviet yang dahsyat. Ia lalu menghilangkan bagian yang paling mengancam dari kekuatan militer dan kebijakan luar negeri Soviet untuk membuktikan

⁵ Jerry Indrawan, *op.cit*, hlm. 134.

usahanya menghilangkan pre-konsepsi, ketidakpercayaan dan kecurigaan, serta membangun inisiatif saling percaya dengan lawannya.⁶

Security dilemma akan membawa pada *security community*, yang adalah sebuah konsep yang dimunculkan oleh Karl Deutsch tahun 1957 tentang integrasi manusia berdasarkan teritori atau kelembagaan, serta membentuk komunitas yang mempraktekkan kesalingtergantungan antara mereka. Komunitas ini percaya bahwa masalah-masalah sosial harus bisa diselesaikan melalui cara-cara damai (*peaceful change*). Dua konsep ini (*security dilemma* dan *security community*) menawarkan harapan untuk melalui dunia yang berbahaya ini dengan cara-cara yang lebih positif dan upaya-upaya untuk membangun kepercayaan. Dengan kata lain, membangun perdamaian internasional.⁷

Berangkat dari teori-teori yang ada di lingkup ilmu hubungan internasional termaktub di atas, kemudian lahirlah Studi Perdamaian. Sekalipun sebelum muncul Studi Perdamaian, Hubungan Internasional juga “menelurkan” kajian yang dikenal sebagai Studi Keamanan, namun kajian Studi Perdamaian bisa juga dikatakan sebagai “anak langsung” dari lingkup ilmu hubungan internasional.⁸

Lebih lanjut, melalui penelusuran studi pustaka tulisan ini akan membahas apa yang dimaksud dengan Studi

⁶ *Ibid*, hlm. 27-28.

⁷ *Ibid*, hlm. 28.

⁸ *Ibid*, hlm. 12.

Perdamaian, konflik, dan transformasi konflik, dalam kaitannya dengan ilmu Hubungan Internasional.

Apa itu Studi Perdamaian ?

Perdamaian pada umumnya diasosiasikan dengan konsep resolusi konflik, dimana dalam proses penyelesaian konflik tersebut, tidak ada kekerasan yang digunakan untuk mencapai situasi damai. Perdamaian sendiri dapat diartikan, sebagai suatu kondisi di mana masyarakat bisa hidup secara berdampingan, meskipun masyarakat tersebut memiliki perbedaan budaya, sosial, dan lain-lain. Perbedaan tersebut bukanlah suatu hambatan karena adanya kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, sehingga adanya pemahaman dan toleransi yang baik diantara masyarakat yang berbeda tersebut.⁹

Ada tiga jenis kekerasan, yaitu kekerasan secara langsung, struktural, dan kultural. Kekerasan langsung adalah segala macam bentuk kekerasan dalam bentuk verbal yang mengakibatkan luka fisik dan penderitaan yang dalam bagi seseorang. Perang adalah contoh yang paling tepat untuk menggambarkan bentuk dari kekerasan langsung. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang terjadi secara non-verbal, seperti kemiskinan, kelaparan, penindasan, dan pengasingan sosial yang menyebabkan penderitaan mendalam bagi seseorang. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia didalam sebuah negara, di mana

kebebasan berpendapat, aktif dalam politik, serta penindasan-penindasan lainnya, adalah sebuah bentuk dari kekerasan struktural.¹⁰

Kemudian, kekerasan kultural adalah segala bentuk kekerasan yang diproduksi dari rasa kebencian, ketakutan, dan prasangka. Sumber-sumbernya dapat berasal dari agama, ideologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Hal-hal tersebut merupakan hal yang sensitif dan sangat mudah untuk digunakan sebagai alat untuk membenarkan terjadinya konflik dan terganggunya suasana perdamaian. Umumnya, kekerasan kultural memiliki hubungan langsung dengan kekerasan yang dilakukan secara langsung, maupun struktural.¹¹

Bicara Studi Perdamaian, berarti kita juga bicara tentang kebaruan (kekinian) dalam studi Hubungan Internasional, Studi Keamanan, sampai Studi Ilmu Politik. Sekalipun, Studi Perdamaian sudah muncul pasca Perang Dunia II dengan tujuan ingin mencegah kembali timbulnya perang dunia, namun justru pasca jatuhnya Uni Soviet-lah studi ini banyak mengalami perkembangan dan pembaruan. Ketika awalnya studi ini hanya berputar pada ruang lingkup internasional, namun perkembangannya di abad ke-21 sudah mulai komprehensif, bahkan sampai membahas konflik antar-individu, yang menjadi salah satu kajian dari ilmu Psikologi.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 69.

¹¹ *Ibid*, hlm. 69-70.

⁹ Perwita dan Sabban, *op.cit*, hlm. 68.

Awalnya memang Studi Perdamaian hanya berfokus terhadap bahasan perlombaan senjata antara Blok Barat vs Blok Timur, serta kemungkinan pecahnya perang nuklir, mengingat era Perang Dingin adalah era yang ditandai oleh *nuclear hostility*, terutama oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian, pasca tahun 1990-an isu-isu *peacemaking*, *peacekeeping*, *peacebuilding*, dan resolusi konflik masuk dalam kajian Studi Perdamaian. Bahasannya mencakup teori konflik, proses dari pencegahan, manajemen, resolusi, transformasi konflik, dll. Bidang ilmu ini bersifat interdisipliner, seperti politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, pertahanan dan keamanan, sampai kriminologi dan komunikasi. Fokus studinya tidak hanya perang antar negara, tapi juga konflik individu, lokal, domestik, dan tentunya internasional. Studi Perdamaian di era ini meredefinisi konsep perdamaian, bentuk-bentuk kekerasan, penyebab perang, dan resolusi perang.¹²

Berkembangnya pusat-pusat riset perdamaian, seperti Departemen *Peace and Conflict* di Uppsala University Sweden, *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), dan *Peace Research Institute in Oslo* (PRIO), di negara-negara Skandinavia membuat studi ini berkembang pesat, apalagi di tengah-tengah era perang dingin. Sampai sekarang, tiga lembaga tersebut menjadi *leading research center* dalam kajian-kajian mengenai Studi Perdamaian, yang tentunya tidak hanya bicara *how to*

make peace, tetapi juga belajar banyak tentang kajian-kajian seputar isu-isu keamanan, pertahanan, serta militer. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam mengapa sebuah negara ingin berperang. Dengan begitu, Studi Perdamaian juga akan mampu menjawab bagaimana resolusi atau cara penyelesaiannya (*conflict resolution*), sampai bagaimana mencegahnya.

Pasca Perang Dingin usai, konflik didalam negara (*intra-state*) banyak bermunculan, terkadang berkembang menjadi masalah internasional (*internationalized*). Masalah lokal dengan cepat menjadi internasional. Semua terkait sumber daya, lingkungan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Begitu juga dengan paradigma keamanan di abad 21 ini, terutama pasca 9/11, yang sangat didominasi Amerika Serikat, karena ditopang kekuatan militer yang kuat. Sistem internasional menjadi rapuh dan tidak aman. Untuk itu, Studi Perdamaian harus mampu menjawab tantangan ini dengan memberikan solusi alternatif terhadap paradigma keamanan yang berkembang sekarang, serta mengedepankan kajian-kajian, seperti *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* di atas, termasuk intervensi yang beretika, demiliterisasi, dan kontrol senjata global. Secara umum, menurut penulis studi ini harus mampu menjadi *global conflict prevention*.

Bapak Studi Perdamaian, Johan Galtung dari PRIO, menjelaskan bahwa damai adalah kondisi tanpa kekerasan

¹² Jerry Indrawan, *op.cit*, hlm. 136.

yang bukan hanya bersifat personal atau langsung tetapi juga bersifat struktural atau tidak langsung. Galtung juga menekankan bahwa kondisi damai adalah kondisi tanpa kekerasan dan ketidakadilan sosial didalam masyarakat.¹³ Johan Galtung juga menyebutkan bahwa terdapat dua definisi tentang perdamaian. Pertama, *negative peace*, yang ditandai dengan ketiadaan konflik antara kedua pihak atau lebih yang berusaha mencapai kepentingan masing-masing, ketiadaan asimetri ketakutan, dan ketiadaan perbenturan kepentingan. Ciri-ciri lainnya, adalah ketiadaan penunjukkan kekuatan (*show of force*) dan suasana yang terjadi bukan sekedar tanpa perang, tetapi ketidakadilan sosial dan penindasan ekonomi belum terselesaikan.¹⁴

Definisi kedua, *positive peace*, yang ditandai dengan keberadaan suatu perangkat penyelesaian konflik yang bersifat non-koersif untuk mencegah timbulnya konflik. Hal ini termasuk tidak adanya kondisi-kondisi yang menekan atau menyengsarakan manusia, yang meliputi spektrum kondisi yang sangat luas, terjaminnya kebutuhan lahiriah (keamanan dari kekerasan dan kelaparan) dan batiniah (keamanan dari rasa takut, jaminan untuk melakukan ibadah, serta kebebasan untuk berpikir dan berpendapat). Adanya perangkat penyelesaian konflik yang demokratis dan non-koersif, situasi ketiadaan perang,

terciptanya keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, dan pembagian politik yang luas adalah langkah awal terciptanya *positive peace*.¹⁵

Oleh sebab itu, dalam kondisi damai positif menurut Galtung, haruslah terdapat hubungan yang baik dan adil dalam semua segi kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun ekologi. Dengan demikian, kekerasan struktural seperti kemiskinan dan kelaparan, kekerasan sosio-kultural seperti rasisme, seksisme, dan intoleransi beragama, ataupun kekerasan ekologi, seperti perusakan alam, polusi, dan konsumsi yang berlebihan menjadi sirna. Kondisi damai positif inilah yang harus diusahakan setelah tercapainya damai negatif, yaitu dengan tidak adanya kekerasan langsung atau fisik, baik makro maupun mikro, seperti peperangan, penyiksaan, serta kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan.¹⁶ Akan tetapi, sekalipun tidak ada kekerasan langsung, eksistensi dari kekerasan struktural yang ada (damai negatif) dapat juga mengakibatkan konflik muncul kembali (*re-lapse*) dan perdamaian menjadi terganggu.¹⁷

Studi Perdamaian mendorong terciptanya perdamaian dalam komunitas internasional, maupun lokal. Hal ini dimungkinkan karena Studi Perdamaian menelusuri sejarah manusia lebih jauh daripada studi-studi lain. Selain itu, studi ini juga melakukan proyeksi mengenai

¹³ Loreta N. Castro dan Jasmine N. Galace, *Peace Education: Pathway to A Culture of Peace*, (Cuezon City: Centre of Peace Education, 2010), hlm. 19.

¹⁴ Johan Galtung, *Peace By Peaceful Means*, (London: SAGE Publications, 1996), hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁶ Castro dan Galace, *op.cit*, hlm. 21.

¹⁷ Charles Webel dan Johan Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, (New York: Routledge, 2007), hlm. 6.

masa depan untuk melihat interaksi manusia dalam konteks memahami potensi konflik antar mereka. Pernyataan Johan Galtung yang terkenal, adalah: “*By peace we mean the capacity to transform conflicts with empathy, without violence, and creatively a never-ending process*”.¹⁸ Studi Perdamaian harus bermuara pada terciptanya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, baik dalam perang, konflik, atau masalah-masalah lainnya. Untuk itulah, *end result* dari Studi Perdamaian untuk menawarkan opsi-opsi alternatif yang bisa digunakan sebagai *conflict resolution*.

Luigi da Porto mengemukakan siklus *peace and conflict* yang menarik. “Perdamaian mendatangkan kemakmuran, kemakmuran mendatangkan kebanggaan, kebanggaan mendatangkan amarah, amarah mendatangkan perang, perang mendatangkan kemiskinan, kemiskinan mendatangkan kemanusiaan, kemanusiaan mendatangkan perdamaian”.¹⁹ Karena itulah, bicara damai pasti bicara perang atau konflik. Konflik tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Atas dasar itulah, memahami Studi Perdamaian berarti mengenali apa yang dimaksud konflik. Bahasan selanjutnya akan membantu kita memahami sekelumit hal tentang apa yang disebut konflik.

Apa Yang Dimaksud Konflik?

Bicara konflik, kita harus mengetahui definisinya yang ada secara umum.

¹⁸ Johan Galtung, *op.cit*, hlm. 11.

¹⁹ Jerry Indrawan, *op.cit*, hlm. 138.

Konflik adalah *contention* atau *disputation* antara dua pihak atau lebih, dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menaklukkan satu sama lain dan memaksakan perdamaian sesuai dengan syarat yang diajukan pemenang perang. Sedangkan, menurut Ralph Dahrendorf dalam Weber dan Galtung, konflik adalah ketegangan yang meliputi pengambilan keputusan terkait bermacam-macam pilihan, yang terkadang dimanifestasikan dalam bentuk konfrontasi antar kelompok-kelompok sosial. Dan menurut Peter Wallensteen dalam Weber dan Galtung, konflik adalah situasi sosial, dimana setidaknya dua aktor (pihak) bersaing di saat yang sama untuk mendapatkan sumber daya yang langka.²⁰

Konflik juga dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.²¹ Secara sosiologis konflik mengacu pada perjuangan terselubung antara individu-individu atau kelompok dalam masyarakat atau negara-bangsa. Ini mungkin terjadi antara dua orang atau lebih, gerakan sosial, kelompok kepentingan, kelas, gender, organisasi, partai politik, etnis, ras, atau perkumpulan keagamaan.²²

Sumber konflik, menurut Johan Galtung, adalah perbedaan kepentingan antar aktor, dan juga nilai yang berbeda

²⁰ Weber dan Galtung, *op.cit*, hlm. 2-3.

²¹ Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2001), hlm. 4.

²² Imam Tholikhah, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 6-7.

dari berbagai aktor. Sedangkan menurut C.R. Mitchell, sumber konflik adalah sumber daya yang terbatas, ketidakmerataan sumber daya, perbedaan tujuan dan kepentingan, dan nilai yang berbeda dalam tiap sistem sosial. Selain itu, SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), kebutuhan dasar manusia, rivalitas negara, ketidakadilan sistem internasional, sampai identitas sosial atau budaya, serta komunikasi juga bisa dikategorikan sebagai sumber konflik. Jadi, inti dari konflik adalah adanya perbedaan kepentingan, perbedaan nilai, dan juga keterbatasan sumber daya. Tahapan konflik sedikitnya ada enam, yaitu:

1. Adanya sumber konflik. Sesuatu yang menyebabkan konflik bisa terjadi, tetapi bukanlah penyulut konflik.
2. Isu atau Permasalahan konflik. Materi yang menjadikan konflik dapat terjadi (pemicu konflik).
3. Eskalasi konflik. Peningkatan konflik menuju puncak konflik. Terjadi ketika ada peningkatan jumlah aktor dan sarana konflik.
4. Puncak konflik. Kondisi ketika konflik mencapai pada tingkatan tertinggi dengan adanya aktor yang maksimal dan sarana konflik telah maksimal.
5. Terminasi Konflik. Penurunan konflik dimana ketika konflik menuju pada penyelesaian. Hal ini terjadi jika aktor menarik diri dari konflik atau terdapat pengurangan sarana konflik.

6. Penyelesaian Konflik. terselesaikannya konflik melalui negosiasi (tukar menukar informasi dan kepentingan), mediasi (Penengahan konflik melalui pihak ketiga), arbitrase (pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik oleh pihak ketiga yang ditunjuk pelaku konflik).²³

Konflik adalah kenyataan hidup yang tidak terhindarkan. Akar konflik bermula dari adanya perbedaan, baik alami maupun non-alami (perolehan). Perbedaan adalah kenyataan yang dihadapi setiap manusia yang mengakibatkan manusia saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Ketika sasaran dan situasi mereka tidak sesuai, terjadilah konflik. Perang terjadi karena munculnya perbedaan.²⁴ Studi Perdamaian harus memahami *the very essence of this* untuk bisa melakukan proses resolusi konflik. Gunanya memahami konflik agar peneliti-peneliti Studi Perdamaian sanggup merumuskan metode resolusi apa yang paling tepat berdasarkan sebab awal konflik tersebut dapat muncul.

Selanjutnya, penghambat tercapainya perdamaian ada dua. Pertama, kondisi objektif (*state level*), yaitu kepentingan nasional, teritori, kedaulatan, perebutan sumber daya ekonomi dan pembangunan. Kondisi objektif ini terkait dengan kebijakan

²³ Christopher R. Mitchell, *The Structure of International Conflict*, (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 1981), hlm. 17-18.

²⁴ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 72.

atau kepentingan negara sebagai aktor dalam dunia internasional, dan negara sebagai entitas nasional. Asumsinya, setiap tindakan negara didasari oleh pertimbangan rasional (obyektif). Kedua, kondisi subjektif (*community level*), yaitu keinginan memperoleh pengakuan atas suatu identitas, etnisitas, perlindungan atas kebudayaan, dan masalah representasi politik. Kondisi ini sering ditemui didalam wilayah negara sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan negara. Beberapa ciri lainnya adalah kelompok masyarakat dianggap sebagai oposisi negara, adanya asimetri kepentingan antara kelompok masyarakat dan kebijakan negara, serta terkait faktor struktural, seperti sejarah, etnik geografi, teritorial, institusi politik, dan sumber daya alam.²⁵

Menyambung bahasan Studi Perdamaian yang sudah penulis sebutkan di atas, Galtung menambahkan, bahwa ada tiga tahap penyelesaian konflik yang nantinya digunakan oleh PBB dalam setiap kesempatannya menjadi mediator konflik, maupun pengerahan *peacekeeping operation* (UN PKO). Tiga tahap itu adalah:

1. *Peacemaking* adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.
2. *Peacekeeping* adalah proses

menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

3. *Peacebuilding* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng.²⁶

Jauh sebelum Galtung, Imanuel Kant di abad ke-18 sebenarnya sudah bicara tentang perdamaian dalam bukunya "*Perpetual Peace*". Program perdamaian menurut Kant terdiri dari dua bagian. Pertama, kondisi awal saat sebuah negara republik belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perdamaian internasional. Ini termasuk menghapus tentara yang siap perang, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain, melarang spionase (mata-mata), serta melarang hasutan untuk berkhianat dan pembunuhan sebagai instrumen diplomasi, dan bisnis-bisnis negara. Menyebarkan konstitusi negara republik berarti mengeneralisasikan upaya-upaya untuk mencapai perdamaian, karena berjuang untuk damai adalah bagian dari prinsip dasar negara republik.²⁷

Kedua, Kant mengusulkan tiga

²⁵ Jerry Indrawan, *op.cit*, hlm. 140.

²⁶ Boutros Boutros-Ghali, Introductory Note to An Agenda for Peace, dalam Adam Roberts dan Benedict Kingsbury (ed), *United Nations, Divided World: The UN's Roles in International Relations*, (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 469.

²⁷ Asrudin Azwar, *Teori Perdamaian Demokratis: Asal Usul, Debat, dan Problematika Seputar Teori Perdamaian Demokratik*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 39.

pondasi perdamaian sebagai reaksi dari pernyataan Hobbes, “*the war of all against all*”. Pertama, konstitusi dari setiap negara harus berbentuk republik. Kedua, hukum yang mengatur antar negara akan dibangun pada sebuah federasi dari negara-negara bebas. Ketiga, hukum kewarganegaraan dunia akan dibatasi pada ketentuan-ketentuan universal dari hidup bertetangga dengan negara-negara lain. Sebuah federasi dari kumpulan negara-negara bebas akan menyediakan sistem keamanan bersama (*collective security*). Kant membedakan antara akhir dari perang dan penciptaan kondisi damai yang positif. Pasca perang dunia, para pemikir liberal mulai menekankan pada pembentukan mekanisme-mekanisme arbitrase, pengembangan hukum-hukum internasional, dan pengadilan (mahkamah) internasional.²⁸

Dalam karya-karyanya, Kant banyak bicara tentang perdamaian dunia. Salah satu tesisnya adalah “Perdamaian Demokratis (*democratic peace*)”. Tesis ini berkembang menjadi dua varian. Varian pertama mempertahankan pendapat bahwa negara demokrasi lebih damai daripada negara non-demokrasi dan mereka umumnya lebih tentram. Varian kedua mempertahankan pendapat bahwa negara-negara liberal tidak bisa dibilang lebih damai daripada negara-negara non-liberal, tetapi mereka menjauhkan diri dari penggunaan kekuatan senjata agar dapat berhubungan dengan negara-negara lain yang demokratis. Beberapa pakar juga berpendapat bahwa

²⁸ *Ibid*, hlm. 40.

negara demokrasi dapat lebih kuat jika menggunakan kekuatan senjata. Hal ini karena negara-negara demokrasi liberal adalah negara-negara kuat dengan basis kekayaan yang besar. Jalan menuju perdamaian adalah dengan mendorong sistem yang demokratis, penghormatan universal terhadap hak asasi manusia, dan perkembangan masyarakat sipil modern (*civil society*).²⁹

Kita sadar dengan banyaknya konflik yang terjadi di seluruh dunia. Lebih dari setengah konflik-konflik tersebut adalah konflik bersenjata. Studi Perdamaian juga menyinggung tentang konflik bersenjata. Kita pun harus memahami apa yang disebut dengan konflik bersenjata (*armed conflict*). Menurut *International Committee of the Red Cross* (Palang Merah Internasional), konflik bersenjata adalah perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara dua negara yang mengarah pada intervensi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata masing-masing negara. Sedangkan, menurut Peter Wallensteen, konflik bersenjata adalah konflik politik, di mana penggunaan angkatan bersenjata oleh kedua belah pihak, setidaknya di salah satu pihak, mengakibatkan sedikitnya 25 pertempuran yang mengakibatkan kematian. Wallensteen menambahkan, konflik bersenjata yang besar (*Major Armed Conflict*) adalah perang antar negara, maupun konflik politik dalam negeri, yang mana pertempurannya mengakibatkan setidaknya 1000 kematian sebagai akibat dari konflik tersebut.³⁰ Sampai saat ini, paling tidak ada empat

²⁹ *Ibid*, hlm. 54-55.

³⁰ Jerry Indrawan, *op.cit*, hlm. 142.

tipe konflik bersenjata:

1. Konflik bersenjata internasional (*interstate armed conflicts*). Konflik ini terjadi antar negara, dengan dua atau lebih pihak yang berkonflik adalah negara yang secara internasional diakui kedaulatannya (*sovereign entities*). Konflik seperti ini sifatnya cepat selesai, tetapi biasanya membawa dampak kehancuran yang sangat besar. Pasca Perang Dunia II, negara-negara yang terlibat perang satu sama lain berkurang drastis. Kondisi ini membawa pada tipe konflik bersenjata yang kedua.
2. Konflik bersenjata non-internasional (*intrastate armed conflicts*). Konflik ini terjadi didalam sebuah negara, antara pemerintah yang berdaulat (*sovereign entity*) melawan pihak lain yang bukan pemerintah. Banyaknya konflik non-internasional yang terjadi pasca Perang Dunia II, menurut Sivard, disebabkan munculnya negara-negara baru didalam sistem internasional. Jadi, perang domestik adalah bentuk paling umum dari konflik bersenjata yang banyak terjadi dewasa ini. Contohnya, perang sipil, perang memperebutkan kontrol pemerintahan suatu negara, maupun konflik-konflik terkait sumber daya, teritori, dan perbedaan nilai atau kepercayaan, yang menimbulkan gerakan separatisme atau pemberontakan.

Konflik seperti ini juga memiliki dampak kehancuran yang besar, terutama korban jiwa. Hal ini karena durasi konflik yang umumnya terjadi dalam waktu panjang. Dalam perkembangannya, muncul juga tipe kekerasan bersenjata yang ketiga.

3. Konflik bersenjata yang terinternasionalisasikan (*internationalized armed conflicts*). Konflik tipe ini adalah konflik dimana, baik pemerintah maupun kelompok bersenjata non-negara yang melawannya, menerima bantuan militer dari pemerintah atau pihak-pihak asing di luar negara tersebut, contohnya, pemerintah Bashar Assad di Suriah melawan pihak oposisi. Konflik ini juga termasuk beberapa pengertian lain: perang antara dua faksi internal didalam sebuah negara, yang masing-masing didukung pihak-pihak asing yang berbeda, contohnya, Hamas dan Fatah; pertempuran langsung antara dua negara yang berbeda, yang secara militer mengintervensi konflik bersenjata internal negara lain, untuk mendukung salah satu pihak, contohnya banyak terjadi pada era Perang Dingin antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet, didalam konsep perang yang dinamakan “*proxy war*”; dan perang yang melibatkan intervensi asing yang mendukung kelompok pemberontak yang berperang melawan pemerintahan yang berdaulat, contohnya NATO

yang mendukung kelompok pemberontak Libya, *National Transitional Council* (NTC), melawan pemerintahan Moammar Gaddafi.

4. Terakhir, konflik di luar negara (*extrastate conflicts*). Konflik ini terjadi antara negara melawan kelompok bersenjata di luar pemerintah, yang terjadi di luar wilayah negara tersebut. Contohnya, perang antara pemerintah Irak melawan gerakan militan ISIS (*Islamic State of Iraq and al-Sham*), di mana pertempurannya tidak hanya terjadi di wilayah Irak, tetapi berdampak sampai Suriah, Yordania, Lebanon, bahkan Palestina. Selain itu, perang Amerika Serikat melawan Al-Qaeda di Afghanistan yang juga meluas sampai wilayah Pakistan dan Irak.³¹

Selanjutnya, penulis dalam kesempatan ini juga ingin menyorot peran organisasi regional dalam *conflict resolution*. Strategi resolusi konflik bagi organisasi regional, adalah pengaturan norma (*norm-setting*), kepastian, pembangunan masyarakat, pencegahan, non-intervensi atau intervensi, isolasi, mediasi, dan internasionalisasi. Pengaturan norma menegaskan tentang identitas negara dan juga mengatur perilaku. Melalui strategi ini organisasi regional dapat mempengaruhi perilaku negara-negara anggota secara internasional, maupun internal, dalam arena-arena politik, ekonomi, dan

³¹ *Ibid*, hlm. 143-144.

keamanan. Strategi kepastian, contohnya, dapat meningkatkan transparansi, mengurangi ketidakpastian, dan membantu menimbulkan kepercayaan. Tujuannya untuk meredakan *security dilemma* dan mengurangi penggunaan kekuatan senjata.³²

Langkah berikutnya adalah strategi pembangunan masyarakat, dengan tidak lagi menggunakan kekuatan senjata, tetapi mendorong ke arah pembentukan komunitas keamanan, dimana anggotanya tidak berperang satu sama lain, tetapi menyelesaikan sengketa melalui jalan lain. Strategi pencegahan meliputi keamanan kolektif (*collective security*) dan pertahanan kolektif (*collective defense*), untuk mencegah negara-negara anggota atau non-anggota bersikap agresif.³³

Strategi untuk membatasi konflik adalah non-intervensi atau intervensi, dan isolasi. Non-intervensi adalah ketika organisasi regional menghindari untuk terlibat dalam konflik-konflik tertentu. Di sisi yang lain, intervensi berarti keterlibatan langsung dalam sebuah konflik dengan menggunakan sumber daya kolektif yang tersedia dari organisasi regional tersebut, seperti keamanan kolektif untuk membatasi bahkan meredakan konflik. Sedangkan, isolasi berguna untuk mencegah dan menghambat konflik dan dampaknya menyebar ke wilayah sekitar, maupun keterlibatan pihak luar terhadap

³² Barry Buzan dan Ole Weaver, *Regions and Powers : The Structure of International Security*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), hlm. 102.

³³ Allan Collins (ed), *Contemporary Security Studies*, (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 54.

konflik tersebut.³⁴

Terakhir, strategi intermediasi dan internasionalisasi yang berguna untuk mengentikan konflik. Intermediasi artinya pendekatan non-partisan dan non-kekerasan untuk menyelesaikan sengketa, di mana pihak-pihak yang berselisih diminta menggunakan mekanisme global atau regional untuk menyelesaikan konflik. Internasionalisasi adalah kejadian-kejadian di mana organisasi regional memobilisasi sumber daya dari aktor-aktor dan organisasi-organisasi eksternal untuk membantu strategi mereka. PBB, Uni Eropa dan NATO selama ini dapat dijadikan contoh bagi peran organisasi internasional dalam resolusi konflik, sekalipun efektif atau tidaknya mereka tentunya masih *debatable*.

Transformasi Konflik

Bahasan terakhir dalam artikel ini adalah transformasi konflik. Pasca berkembangnya Studi Perdamaian, dalam kajian-kajian konflik dan perdamaian mulai terlihat perkembangan yang signifikan terkait istilah “transformasi”. Johan Galtung telah mendorong konsep transformasi ini ke panggung dengan menjelaskan bahwa definisi perdamaian adalah terkait erat dengan cara-cara non-kekerasan (*non-violent*) dan transformasi konflik yang kreatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli yang mendorong konsep ini, transformasi konflik adalah sebuah konsep atau ide

³⁴ Aiden Hehir, *Humanitarian Intervention after Kosovo: Iraq, Darfur, and the Record of Global Civil Society*, (UK: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 88-89.

yang optimistik, radikal, dan egaliter, yang melihat konflik sebagai sebuah sumber yang dinamis untuk melakukan perubahan yang positif. Para ahli juga berjanji untuk membawa penelitian-penelitian terkait konflik dan perdamaian ke arah tujuan yang baru dan menarik di awal abad ke-21 ini.³⁵

Dalam Studi Perdamaian, transformasi konflik harus mendapat perhatian yang serius. Secara praktis, transformasi konflik adalah salah satu metode resolusi atau penyelesaian konflik yang menjadi bagian dari kajian Studi Perdamaian. Karena itu, konsep transformasi konflik harus dipraktekkan sebagai salah satu metode resolusi konflik. Transformasi konflik harus mendapat perhatian yang serius karena di dalamnya terkandung ide dan gagasan tentang bagaimana seharusnya memberikan respons terhadap konflik yang bersifat destruktif.

Menurut penulis, transformasi konflik sendiri adalah sebuah proses kompleks untuk secara konstruktif mengubah pola hubungan, sikap, perilaku, kepentingan, dan diskursus dalam sebuah lingkungan yang rawan konflik. Ia adalah sebuah proses mengubah (*transform*) hubungan, kepentingan, diskursus, dan jika perlu, konsep dasar dari sebuah masyarakat yang menyuburkan (melanggengkan) terjadinya kekerasan secara kontinu. Kekerasan banyak terjadi karena budaya, untuk itu proses

³⁵ Stephen Ryan, *Conflict Transformation: Reasons to be Modest*, dalam Dennis Sandole, dkk, *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*, (New York: Taylor & Francis, 2009), hlm. 303.

transformasi dalam sebuah daerah pasca terjadinya konflik, sangat memerlukan upaya untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dan perilaku-perilaku destruktif, yang mengarah pada pelestarian budaya kekerasan.

Transformasi konflik tidak hanya bicara tentang bagaimana mencari hasil yang *win-win*. Terkadang, hasil tidak selalu menunjukkan keadaan sebenarnya dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun hubungan diantara mereka. Transformasi konflik memfokuskan dirinya pada kajian sosial dan politik yang lebih luas, dengan tujuan memutus rantai penindasan dan kekerasan. Karena itulah, seperti yang penulis sebutkan sebelumnya, transformasi konflik tidak hanya sekedar bertujuan untuk menghentikan kekerasan dan mengubah pola-pola hubungan negatif antar pihak-pihak yang berkonflik, tapi juga untuk mengubah struktur politik, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan adanya pola-pola hubungan negatif tersebut. Konflik yang konstruktif dilihat sebagai sebuah katalis bagi terjadinya perubahan.³⁶

Transformasi konflik harus menghormati dan mendukung sumber daya manusia dan budaya dari lokasi di mana konflik itu terjadi. Hal ini termasuk perubahan cara pandang, yang biasanya fokus pada lokasi dan manusia (aktor yang terlibat konflik) sebagai masalah dan pihak luar sebagai jawabannya, menjadi fokus pada tujuan jangka

panjang dari proses transformasi itu sendiri, termasuk membangun manusia dan sumber daya lainnya di lokasi tempat konflik itu terjadi. Transformasi konflik bertujuan memberdayakan masyarakat untuk terlibat sendiri dalam proses non-kekerasan, yang bertujuan membangun kondisi damai dan berkeadilan secara berkelanjutan. Menurut Lederach, daripada melihat damai sebagai sebuah hal yang statis, konflik transformasi melihat perdamaian sebagai sebuah hal yang terus-menerus berkembang (*evolve*) dan mengembangkan pola hubungan yang berkualitas.³⁷

Dalam transformasi konflik, konflik tidak dilihat sebagai sebuah hal yang negatif. Dari sisi positif, konflik dapat membawa perubahan yang dibutuhkan untuk mendatangkan masyarakat yang lebih adil dan setara. Transformasi konflik mengubah cara-cara kekerasan menjadi cara-cara non-kekerasan untuk mencapai perubahan sosial. Transformasi konflik juga bisa dilihat sebagai langkah pencegahan konflik, karena ia bisa juga menghilangkan penyebab terjadinya konflik untuk muncul kembali. Transformasi konflik sangat tepat digunakan dalam konflik yang terjadi berkepanjangan dan asimetris, dan terkait masalah-masalah keadilan sosial. Konflik akan selalu ada di setiap peradaban manusia manapun, dan tidak akan pernah selesai. Eksistensi manusia sangat bergantung pada kemampuannya mengelola konflik. Untuk bisa mengelola, sampai meresolusi konflik, maka fokus perhatian harus diarahkan pada analisis

³⁶ Ho-Won Jeong, *Understanding Conflict and Conflict Analysis*, (New Delhi: SAGE Publications, 2008), hlm. 243-244.

³⁷ Stephen Ryan, *op.cit*, hlm. 304-305.

perilaku manusia dan lingkungannya.

Banyak pakar berpendapat bahwa konflik adalah sesuatu hal yang positif karena merupakan unsur utama dalam kehidupan sosial. Konflik juga tidak dapat selalu dimusnahkan, sebaliknya dalam keadaan tertentu konflik memiliki fungsi tertentu dalam proses pembangunan. Konflik dibutuhkan karena berguna untuk membuat kita menyadari adanya masalah, mendorong ke arah perubahan yang diperlukan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, dan mendorong kedewasaan psikologis.³⁸

Manusia hidup berkelompok sebagai satu kesatuan dan membentuk identitas unik di antara mereka. Nilai-nilai didalam sebuah masyarakat dapat dilihat dalam bentuk ras, etnik, identitas budaya, dan pengelompokkan-pengelompokkan sosial lainnya. Identitas ini terkadang menciptakan masalah antar-manusia dalam konteks interaksi untuk memenuhi kepentingan mereka. Situasi seperti ini terjadi ketika budaya berada sejalan dengan eksistensi kekuasaan (*power*). Seperti yang sudah disebutkan juga, konflik terkadang dipersepsikan sebagai sebuah situasi yang negatif dan membuat situasi atau keadaan menjadi tidak stabil. Sedangkan, di sisi lain konflik dipercaya sebagai sebuah proses positif untuk perubahan yang lebih baik. Karena itu, konflik harus diakui keberadaannya

³⁸ Adon N. Jamaludin, *Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 36.

sebagai sebuah bentuk interaksi yang positif dalam sebuah masyarakat.³⁹

Uri Savir menyebutkan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui kerja sama dan sikap positif di antara masyarakat negara-negara yang sedang berkonflik. Savir melihat bahwa hubungan antar-manusia dipengaruhi oleh budaya, institusi sosial, dan proses politik. Kekuatan utama untuk menciptakan perdamaian bukanlah pada pemerintah pusat, tetapi pada pemerintah lokal dan terutama untuk keterlibatan masyarakat madani (*civil society*) dalam proses perdamaian itu sendiri. Savir percaya bahwa koeksistensi nilai-nilai bersama adalah aspek paling penting dalam mewujudkan perdamaian di dalam sebuah masyarakat.⁴⁰

Proses transformasi konflik memang berjalan lambat dan sulit untuk diikuti. Serangkaian interaksi dapat berubah seiring waktu. Begitu pula saat lingkungan berubah, para pihak yang berkonflik menyesuaikan posisi dan tujuan mereka juga. Dalam proses perdamaian dan perundingan yang rumit, pihak-pihak yang terlibat seringkali hanya berhasil mendapatkan resolusi yang memuaskan sebagian, tetapi tidak semua pihak yang berkonflik. Dibutuhkan penyesuaian dari awal lagi agar perubahan situasi, lingkungan, dan kepentingan dapat diterima semua pihak. Akan tetapi, menariknya adalah, pihak-pihak

³⁹ Kevin Avruch, *Culture and Conflict Resolution*, (Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1998), hlm. 310.

⁴⁰ Uri Savir, *Peace First: A New Model to End War*, (San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, 2008), hlm. 76.

yang berkonflik akhirnya belajar untuk menyesuaikan posisi mereka, sampai ke titik di mana tercapainya hasil yang dapat diterima semua pihak.⁴¹

Kita perlu berasumsi bahwa untuk membangun perdamaian bergantung pada kemungkinan bahwa para pihak yang berkonflik memiliki tujuan yang serupa atau sama, atau bahkan tujuan yang dapat saling melengkapi, selama proses perubahan lingkungan sosial terjadi. Para pihak-pihak yang berkonflik memiliki kekuatan untuk membangun hubungan damai dengan bergerak bersama-sama dengan cara kooperatif. Mereka secara bersamaan juga dapat mengejar kesejahteraan orang lain, serta diri mereka sendiri. Mereka akan menghargai kebaikan bersama, seperti halnya mereka menghargai kebaikan diri mereka sendiri. Akan terjadi kerja sama diantara pihak-pihak yang berkonflik untuk berusaha untuk hidup berdampingan, sekaligus mendapatkan kepentingannya masing-masing dalam konteks kebaikan bersama tadi.⁴²

Para ahli yang mengamati proses transformasi konflik menekankan pada pentingnya mengerjakan konsep ini di level akar rumput (*grassroots*). Mereka juga merujuk pekerjaan ini sebagai upaya membangun kapasitas lokal (*building local capacity*). Hal ini karena resolusi konflik tidaklah memiliki satu ukuran atau prosedur baku bagaimana cara melakukannya. Setiap konflik memiliki ciri

⁴¹ Hugh Miall, *Emergent Conflict and Peaceful Change*, (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hlm. 80-81.

⁴² *Ibid*, hlm. 68.

khas, sehingga diperlukan cara-cara yang berbeda dalam menyelesaikannya, kasus demi kasus. Tidak ada solusi yang bersifat “*one size fits all*” dalam resolusi konflik. Fokus dari pemberdayaan solusi dari akar rumput akan menarik perhatian organisasi masyarakat sipil (LSM) karena mereka biasanya memiliki kepentingan untuk menguatkan masyarakat sipil di daerah-daerah pasca konflik. Terakhir, semua sepakat bahwa transformasi konflik membutuhkan banyak waktu. Tidak ada yang dinamakan “pendekatan ala kopi instan”. apalagi, banyak orang juga butuh waktu membiasakan diri dengan ide atau gagasan terkait perubahan yang cukup dalam.⁴³

Kesimpulan

Studi Perdamaian merupakan bagian integral dari studi Hubungan Internasional, dimana umumnya dinamika antar-negara, atau negara dengan non-negara, terjadi dalam bentuk perang atau damai. Hubungan Internasional tidak mungkin lepas dari Studi Perdamaian karena Studi Perdamaian menawarkan analisis baru tentang bagaimana seharusnya hubungan internasional melihat kompleksitas hubungan antar aktor-aktor dalam kajiannya. Teori-teori yang ada dalam Hubungan Internasional pun berguna untuk mewujudkan perdamaian, baik dalam konteks internasional, nasional, maupun lokal, karena Studi Perdamaian tidak membatasi diri pada satu konteks saja.

⁴³ Stephen Ryan, *op.cit*, hlm. 305.

Memahami Studi Perdamaian berarti memahami apa itu konflik. Konflik berjalan seiring dengan damai, begitu juga sebaliknya. Damai positif dan damai negatif cetusan Johan Galtung dapat menjadi contoh yang baik. Demikian pula jika kita amati konsep transformasi konflik. Konflik tidak dilihat sebagai sebuah hal yang negatif, apalagi jahat (*evil*), namun konflik dimaknai sebagai sebuah *changer* atau perubahan situasi dan kondisi, ke arah yang lebih baik. Konflik dapat menjadi katalis transformasi seorang individu, sebuah masyarakat atau negara, sampai dunia, menuju perdamaian positif yang Galtung cita-citakan.

Dengan demikian, menarik untuk dibahas oleh pembaca, kira-kira bagaimana masa depan ilmu Hubungan Internasional ke depannya dengan bantuan dari kajian Studi Perdamaian? Selain itu, apakah Studi Perdamaian mampu menjawab tantangan zaman, di mana konflik yang banyak terjadi sudah bukan lagi antar-negara (*inter-state*), tetapi didalam negara (*intra-state*)? Kemudian, bagaimana konsep-konsep, seperti intervensi kemanusiaan, operasi-operasi perdamaian, dan transformasi konflik misalnya, dapat dikaji lebih lanjut sehingga memperkaya khazanah ruang lingkup Hubungan Internasional, serta membantu mencari formula yang pas untuk membangun semangat perdamaian.

Karena itu, penulis menyarankan agar kajian tentang Studi Perdamaian dapat diperbanyak di Indonesia melalui

pembukaan program studi Studi Perdamaian atau Resolusi Konflik. Sejauh ini baru dua universitas di Indonesia, yaitu Universitas Pertahanan dan Universitas Gadjah Mada yang membuka Program Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik. Diharapkan dengan pembukaan program studi seperti ini akan semakin banyak telaah-telaah konsep perdamaian yang dilakukan para akademisi, tidak hanya dari Hubungan Internasional, namun disiplin ilmu lain. Suasana akademik lintas ilmu (*cross-discipline*) seperti ini sangat baik dalam membangun semangat melakukan penelitian akademik di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Avruch, Kevin. 1998. *Culture and Conflict Resolution*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Azwar, Asrudin. 2016. *Teori Perdamaian Demokratis: Asal Usul, Debat, dan Problematika Seputar Teori Perdamaian Demokratik*. Malang: Intrans Publishing.
- Boutros-Ghali, Boutros. 1996. Introductory Note to An Agenda for Peace, dalam Adam Roberts and Benedict Kingsbury (ed), *United Nations, Divided World: The UN's Roles in International Relations*. Oxford: Clarendon Press.
- Buzan, Barry dan Ole Weaver. 2003. *Regions and Powers : The Structure of International Security*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Castro, Loreta N. dan Jasmine N. Galace. 2010. *Peace Education: Pathway to A Culture of Peace*. Cuezon City: Centre of Peace Education.
- Collins, Allan (ed). 2010. *Contemporary Security Studies*. New York: Oxford University Press.

- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Galtung, Johan. 1996. *Peace By Peaceful Means*. London: SAGE Publications.
- Hehir, Aiden. 2008. *Humanitarian Intervention after Kosovo: Iraq, Darfur, and the Record of Global Civil Society*. UK: Palgrave Macmillan.
- Indrawan, Jerry. 2019. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.
- Jamaludin, 2015. Adon N. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jeong, Ho-Won. 2008. *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. New Delhi: SAGE Publications.
- Miall, Hugh. 2007. *Emergent Conflict and Peaceful Change*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mitchell, Christopher R. 1981. *The Structure of International Conflict*. United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Perwita, A. A. Banyu dan Nabilla Sabban (ed). 2015. *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ryan, Stephen. 2009. *Conflict Transformation: Reasons to be Modest*, dalam Dennis Sandole, dkk. *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*. New York: Taylor & Francis.
- Savir, Uri. 2008. *Peace First: A New Model to End War*, San Fransisco: Berrett-Koehler Publisher.
- Tholkhah, Imam. 2001. *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Webel, Charles dan Johan Galtung. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.

